

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DALAM SISTEM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT.ASIA PASIFIK FIBERS Tbk : Program Studi Ilmu Hukum,Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang, 2022

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Perlindungan hukum terhadap para pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD tahun 1945.

Perumusan masalah ini: bagaimanakah bentuk perlindungan hukum jaminan sosial ketenagakerjaan dengan sistem perjanjian waktu tertentu di PT.Asia Pasifik Fibers Tbk dan bagaimana hambatan dan solusi dalam pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan di PT. Asia Pasifik Fibers Tbk.

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah *in concreto*. Sumber data adalah sekunder. Pengumpulan data dengan kepustakaan. Penyajian data dengan deskriptif. Analisis data dengan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan PT.Asia Pasifik Fibers terhadap para karyawannya, yaitu dengan mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagkerjaan, memberikan pakaian kerja dan alat kerja, serta membentuk sebuah tim P2K3 (Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang jaminan sosial bagi para pekerja, yaitu: UU No.14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hambatan PT.Asia Pasifik Fibers dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap para pekerjanya tergantung dari pekerja itu sendiri, dimana pekerja harus memberikan data yang lengkap dan benar, jadi apabila pekerja tidak memberikan dokumen yang lengkap maka secara otomatis akan menghambat HRD dalam melakukan proses pemberian jaminan sosial terhadap pekerja.

Kata Kunci: Pekerja, Jaminan Sosial, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Every worker/labor has the right to obtain protection for occupational safety and health, morals and decency as well as treatment in accordance with human dignity and values as well as religious values. Legal protection for workers is the fulfillment of basic rights inherent and protected by the constitution as regulated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution.

The formulation of this problem is what is the form of legal protection for employment social security with a certain time agreement system at PT. Asia Pacific Fibers Tbk and how are the obstacles and solutions in providing employment social security at PT. Asia Pacific Fibers Tbk.

This research method uses normative juridical research type. The research specification is inconcreto. The data source is secondary. Data collection with literature. Presentation of data with descriptive. Data analysis with qualitative.

The results show that the legal protection that PT. Asia Pacific Fibers provides for its employees is by registering its employees with BPJS Employment, providing work clothes and work tools, and forming a P2K3 team (Occupational Health and Safety Development Committee). In providing protection for workers in Indonesia, the Government has issued regulations on social security for workers, namely: Law No. 14 of 1969 concerning Basic Provisions Regarding Manpower, Law No. 3 of 1992 concerning Labor Social Security, Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, Law No. 40 of 2004 on the National Social Security System, Law No. 24 of 2011 on Social Security Administering Bodies. Barriers to PT. Asia Pacific Fibers in providing employment social security to its workers depends on the workers themselves, where workers must provide complete and correct data, so if workers do not provide complete documents it will automatically hinder HRD in carrying out the process of providing social security to workers.

Keywords: **Workers, Social Security, Legal Protection.**

ORIGINALITY REPORT

26%
SIMILARITY INDEX **26%**
INTERNET SOURCES **11%**
PUBLICATIONS **19%**
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.usu.ac.id Internet Source	5%
2	e-journal.unair.ac.id Internet Source	5%
3	search.unikom.ac.id Internet Source	4%
4	pasca-umi.ac.id Internet Source	3%
5	bared18.wordpress.com Internet Source	3%
6	eprints.unisbank.ac.id Internet Source	2%
7	kakek-bodoh.blogspot.com Internet Source	2%
8	akademik.unsoed.ac.id Internet Source	2%



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERPUSTAKAAN

Hayati